

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mendengar kata korupsi, kita akan langsung teringat dengan sebuah tindak kejahatan, bukan cuma sebuah tindak kejahatan biasa namun kejahatan yang dilakukan secara sistematis yang biasanya dilakukan bukan cuma perorangan namun juga berkelompok dan biasanya yang melakukan itu adalah orang yang memegang kekuasaan dan jabatan.<sup>1</sup> Korupsi merupakan sebuah kejahatan moral yang bukan hanya akan menyengsarakan rakyat namun juga akan mencoreng harkat dan martabat bangsa Indonesia. Korupsi adalah kekuatan jahat yang mampu menghancurkan suatu bangsa.<sup>2</sup>

Berbagai macam persoalan terkait korupsi dianggap sebagai hal yang biasa, karena seringkali persoalan itu muncul di berbagai media masa dan tidak ada ujung penyelesaiannya. Parahnya lagi, penanganan serta hukuman bagi koruptor tidak membuat jera seseorang untuk melakukan tindakan yang sama. Akibatnya adalah semakin merebaknya para koruptor yang bermunculan di negeri ini. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruption*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau

---

<sup>1</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 114.

<sup>2</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Garfika, 2013), h. 1.

kebobrokan. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menguras pembayaran tidak resmi dari para investor, memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannya yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindak korupsi.<sup>3</sup>

Korupsi telah menjadi perhatian semua pihak pada saat ini. Bentuk-bentuk dan perwujudan korupsi jauh lebih banyak dari pada kemampuan untuk melukiskannya. Iklim yang diciptakan oleh korupsi menguntungkan bagi tumbuh suburnya berbagai kejahatan. Korupsi pun menjadi permasalahan yang sungguh serius di negeri ini. Kasus korupsi sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, berkembang dengan pesat, meluas di mana-mana, dan terjadi secara sistematis dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Kasus terjadinya korupsi dari hari ke hari kian marak. Pada tahun 2016 (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyatakan bahwa sebanyak 361 kepala daerah di Indonesia terlibat kasus tindak pidana korupsi, dengan rincian 18 gubernur dan 343 bupati dan walikota. Yang 50 kasus di

---

<sup>3</sup> Nuzuz Sakinah, "Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar" *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol.2, No. 1, (2019), h. 39.

antaranya ditangani KPK. Sementara, sisanya 293 kasus ditangani oleh aparat penegak hukum yakni kejaksaan dan kepolisian. Kemudian, dari 18 kasus yang menjerat gubernur, 16 ditangani oleh KPK dan 2 kasus tersisa ditangani oleh kejaksaan.<sup>4</sup>

Salah satu contoh kasus korupsi yang ada di Provinsi Banten yaitu pejabat pemerintah, yakni Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, terbukti melakukan korupsi dan penyuapan. Ratu Atut divonis 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsidi 3 bulan kurungan. Ratu Atut terbukti melakukan tindakan korupsi dengan mengatur proses penganggaran pengadaan alat kesehatan Banten dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 79 miliar.<sup>5</sup>

Rentetan kasus korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat publik di Indonesia membuktikan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum berjalan optimal. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pihak berwajib. Kita semua, khususnya yang bergerak dalam bidang pendidikan wajib turut serta dalam upaya pemberantasan virus masyarakat ini. Seperti sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi yang dapat dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan. Selain mengadakan sosialisasi sikap anti korupsi bisa

---

<sup>4</sup> Uyat Suyatna, "Evaluasi Kebijakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.22, No. 3, (2020), h.325.

<sup>5</sup> Verena, Mario "Pemberitaan Penetapan Ratu Atut Chosiyah Sebagai Tersangka Korupsi", *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 9. No. 3. (2013), h.2.

diberikan kepada anak melalui aplikasi yang bisa di *download* di *Google Playstore* anak bisa memperoleh informasi baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai suatu hal atau masalah. Hal ini agar kita tidak tertinggal isu atau informasi yang saat ini sedang berkembang.<sup>6</sup>

Menanggapi masalah tersebut beberapa kalangan elemen masyarakat mengungkapkan bahwa ada kekeliruan dalam upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah, karena fokusnya hanya kepada menindak para koruptor. Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat anti korupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui pendidikan, sedikit sekali upaya untuk pencegahan korupsi, salah satunya yaitu lewat pendidikan antikorupsi.

Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi ini akan berpengaruh pada perkembangan psikologis siswa. Diharapkan melalui pendidikan mengenai anti korupsi sejak dini dapat menciptakan anak yang memiliki kepribadian lebih mawas diri, sehingga ketika saatnya terjun ke masyarakat, anak tidak lagi mudah terpengaruh dan memiliki pengetahuan yang cukup dan benar mengenai anti korupsi ini. Pertama untuk

---

<sup>6</sup> Nuzuz Sakinah, "Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar" *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol.2, No. 1, (2019), h. 40.

menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Jika korupsi sudah diminimalisasi, maka setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal. Kedua adalah, menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa.<sup>7</sup>

Proses pendidikan mestinya bersifat sistematis dan massif. Cara sistematis yang bisa ditempuh adalah dengan melaksanakan pendidikan antikorupsi secara intensif. Pendidikan antikorupsi menjadi sarana sadar untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Dalam konteks pendidikan “memberantas korupsi sampai keakar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak

---

<sup>7</sup> Handoyono, *Dampak Korupsi Melalui Anti Korupsi* (Semarang: Abdimas, 2014), h.1.

bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi.<sup>8</sup>

Keprihatinan dan kekecewaan masyarakat atas fenomena korupsi memunculkan gerakan-gerakan di masyarakat. Masyarakat berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui gerakan sosial. Dalam hal ini, gerakan sosial dilakukan dengan tujuan untuk melakukan suatu perubahan sosial dengan cara membangun kesadaran kolektif dan membudayakan anti korupsi. Gerakan sosial anti korupsi ini sebagai upaya kolektif yang berkelanjutan dalam mendorong masyarakat untuk ikut terlibat melakukan aksi sosial guna menanggulangi masalah korupsi melalui berbagai komunitas. Komunitas-komunitas yang terlibat memiliki pandangan yang sama terhadap masalah korupsi sehingga memunculkan suatu tindakan kolektif melalui gerakan anti korupsi. Aksi kolektif dalam gerakan anti korupsi bukan hanya dapat dilakukan melalui kampanye, tetapi dapat juga dilakukan melalui berbagai macam cara salah satunya pendidikan. Pendidikan anti korupsi secara garis besar merupakan pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada masyarakat.<sup>9</sup>

FLAC (*Future Leader For Anti Corruption*) hadir sebagai gerakan yang berjuang dalam upaya mengatasi permasalahan korupsi. FLAC sebagai salah satu komunitas tersebar di berbagai

---

<sup>8</sup> Sumiarti, "Pendidikan Anti Korupsi", *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*, Volume 12. No. 2 (2007), h. 50.

<sup>9</sup> Muhammad Arbain, *Pendidikan Anti Korupsi: Konsep, Strategi, dan Implementasi Pendidikan di Sekolah* (Bandung: ALFABETA, 2014), h.7

wilayah menjadi partner pemerintah melakukan aksi kolektif dalam memberikan dorongan kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk membangun kesadaran dan membudayakan nilai-nilai anti korupsi dalam memperkuat pemberantasan korupsi yang sedang berjalan. Melalui pendidikan anti korupsi masyarakat tentunya akan diberikan pengetahuan mengenai persoalan korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Gerakan sosial anti korupsi melalui pendidikan ini akan memberikan pengaruh pada pola pikir, mengubah cara pandang maupun perilaku masyarakat untuk memiliki sikap anti korupsi, sehingga penulis disini tertarik untuk menulis mengenai. ***“Peran Organisasi Future Leader For Anti Corruption dalam Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Banten (Studi Kasus Kota Serang)”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kasus korupsi di Provinsi Banten?
2. Bagaimana peran organisasi Future Leader For Anti Corruption dalam melaksanakan program pendidikan anti korupsi?
3. Apa saja tahapan-tahapan dalam melaksanakan program pendidikan anti korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana kasus korupsi di Provinsi Banten
2. Mengetahui bagaimana peran organisasi Future Leader For Anti Corruption dalam melaksanakan program pendidikan anti korupsi di Provinsi Banten.
3. Mengetahui apa saja tahapan-tahapan dalam melaksanakan program pendidikan anti korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pendidikan antri korupsi, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari serta dapat menambah paradigma baru tentang cara menghilangkan korupsi.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi siswa, dapat memberikan pengetahuan serta memotivasi untuk tidak melakukan korupsi.
- b. Bagi sekolah, dapat menjadi rujukan sebagai suatu program baru sekolah mengenai pendidikan anti korupsi.



- c. Bagi masyarakat, dapat mengetahui tentang pendidikan antikorupsi serta bisa dijadikan sebagai pembelajaran.
- d. Bagi akademisi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan untuk dijadikan penelitian ilmiah berikutnya, baik meneruskan program maupun mengadakan program baru mengenai pendidikan anti korupsi.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu yang menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sebagai bahan perbandingan, dan bahan kajian dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang digunakan adalah berupa skripsi dan artikel di jurnal terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

*Pertama*, skripsi yang telah disusun oleh saudara Muhamad Mufid dari UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2007. "Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Islam". Dalam skripsi tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis yang mendapatkan hasil bahwa penelitian pendidikan anti korupsi dengan Islam mempunyai relevansi yang sangat terkait, perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini adalah penelitian kepustakaan sedangkan yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan, dan penulis tidak

mengkhususkan pembahasan perspektif Islam. Relevansi penelitian ini adalah membahas pendidikan anti korupsi.<sup>10</sup>

*Kedua*, skripsi yang telah disusun oleh saudara Siti Nurkhasanah dari UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2009. “Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam di SMAN 1 Bantul Yogyakarta”. Skripsi ini menggunakan metode kuantitatif, membahas mengenai nilai pendidikan anti korupsi, yang ditelaah dengan kurikulum Pendidikan Agama Islam, dalam skripsi ini diperoleh data nilai-nilai anti korupsi yang terkandung dalam kurikulum PAI di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul adalah kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kedisiplinan, kerja keras, peduli, berani, sederhana, dan mandiri. Implementai nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran dilakukan dengan menekankan nilai-nilai tersebut ketika menjelaskan muatan Pendidikan Agama Islam, juga dalam memberikan wawasan terkait pendidikan anti korupsi itu sendiri. Bedanya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti tidak mengkaji tentang kurikulum pendidikan anti korupsi melainkan pendidikan anti korupsi secara global.<sup>11</sup>

*Ketiga*, skripsi yang telah disusun oleh saudara Rifqi Aziz dari Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2015. “Peran Guru Dalam Penanaman Antikorupsi Siswa Melalui Pembelajaran IPS”.

---

<sup>10</sup> Muhamad Mufid, “Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Islam” (Skripsi Sarjana UIN “Sunan Kalijaga”, Yogyakarta 2007)

<sup>11</sup> Siti Nurkhasanah, “Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Islam di SMAN 1 Bantul Yogyakarta” (Skripsi Sarjana UIN “Sunan Kalijaga”, Yogyakarta 2009)

Skripsi ini menggunakan metode kualitatif, membahas peran guru dalam kegiatan belajar mengajar ataupun di luar kegiatan belajar mengajar sangat berpengaruh bagi pembentukan sikap antikorupsi siswa, implikasi mata pelajaran IPS bagi pembentukan sikap antikorupsi untuk mendukung adanya generasi penerus bangsa yang jujur, adil, bijak, arif, dan tanggung jawab, adanya pencontohan sikap antikorupsi yang dilakukan oleh seorang guru dalam menanamkan nilai jiwa antikorupsi kepada siswa melalui pembelajaran IPS. Bedanya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah disini yang berperan pada pendidikan antikorupsi yaitu organisai Future Leader For Anti Corruption melalui program-program yang menyenangkan seperti laskar antikorupsi, kelas pelopor integritas, Kongkow Pemuda dan Relawan (KOPRAL).<sup>12</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Organisasi**

Organisasi adalah keseluruhan perpaduan unsur manusia dan non manusia yang masing-masing memliki fungsi dalam mencapai tujuan. Organisasi secara sistematik adalah sistem yang bersifat terbuka, seperti halnya sistem sosial. Sebab organisasi mencakup orang dan tujuan-tujuan yang bergantung atas usaha orang untuk mencapai kinerja, hasil, yang menjadi arah yang

---

<sup>12</sup> Rifqi Aziz, "Peran Guru Dalam Penanaman Anti Korupsi Siswa Melalui Pembelajaran IPS" (Skripsi Sarjana IAIN "Syekh Nurjati Cirebon", Cirebon 2015)

benar sebagai sistem sosial. Bahkan melalui perpaduan usaha orang maka organisasi lebih dari sekedar perkumpulan orang belaka.<sup>13</sup>

Organisasi juga merupakan usaha orang yang dinamis dengan memanfaatkan mesin, peralatan, bahan mentah, fasilitas dan uang yang memungkinkan orang-orang menghasilkan sejumlah barang dan pelayanan. Tegasnya dalam organisasi ada sejumlah sumber daya manusia dan material yang terpadu untuk mencapai tujuan organisasi yang disepakati.<sup>14</sup>

### **Unsur-Unsur Organisasi**

Organisasi merupakan perpaduan kerja sama sumberdaya fisik dan manusia. Selain itu di dalalamnya ada juga ada tujuan, pembagian kerja dan hirarki kewenangan. Unsur-unsur organisasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a) Tujuan

Tujuan suatu organisasi adalah untuk menghasilkan barang dan pelayanan. Oranisasi non profit, sebagai contoh: menghasilkan pelayanan dengan keuntungan masyarakat, seperti pemeliharaan kesehatan, pendidikan, proses keadilan, dan pemeliharaan jalan. Bisnis menghasilkan barang konsumsi dan pelayanan seperti mobil, perumahan, peluang rekreasi, perhotelan, lembaga keuangan dan lain-lain.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Rifa'i, *Manajemen Organisasi*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 59

<sup>14</sup> Muhammad Rifa'i, *Manajemen Organisasi*,.....,h. 60.

<sup>15</sup> Muhammad Rifa'i, *Manajemen Organisasi*,.....,h. 62.

### b) Pembagian Kerja

Esensi suatu organisasi adalah usaha manusia, proses melaksanakan pekerjaan kedalam suatu komponen kecil yang melayani tujuan organisasi dan untuk melakukan oleh individu atau kelompok disebut pembagian kerja. Pembagian kerja ini berlangsung untuk memobilisasi organisasi dalam pekerjaan banyak orang untuk mencapai tujuan umum.<sup>16</sup>

### c) Hirarki Kewenangan

Kewenangan adalah hak untuk bertindak dan memerintah pribadi orang lain. Para manajer memiliki kewenangan terhadap bawahannya. Bila organisasi membagi pekerjaan ke dalam bagian kecil, beberapa hal harus dikerjakan untuk mengkoordinasikan usaha menjamin bahwa hasil pekerjaan mencapai tujuan organisasi. Hirarki kewenangan adalah bila posisi kerja ditata agar pembagian kewenangan meningkat, memudahkan koordinasi. Seseorang yang memiliki kewenangan tinggi dapat membuat keputusan yang menghasilkan dalam koordinasi lebih baik dan mengarahkan aktivitas kerja pada level rendah.<sup>17</sup>

Dengan perpaduan unsur manusia, material, dan perangkat tujuan, pembagian kerja yang jelas serta kewenangan, maka suatu organisasi dalam suatu sistem terbuka untuk mencapai tujuan. Begitupun, hal yang paling fundamental adalah fungsi sumberdaya personil sangat menentukan, karena kualitas kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepribadian

---

<sup>16</sup> Muhammad Rifa'i, *Manajemen Organisasi*, .....h. 62.

<sup>17</sup> Muhammad Rifa'i, *Manajemen Organisasi*, .....h. 62.

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sesuai kewenangannya akan menentukan efektivitas dan efisien organisasi. Semua komponen organisasi sebagai sistem tersebut harus bersinergi dalam pencapaian tujuan. Dalam hal ini sinergi adalah menciptakan suatu perpaduan yang menjadikan lebih kuat dari pada sekedar penjumlahan bagian-bagian organisasi.<sup>18</sup>

### **Bentuk Organisasi**

Salah satu usaha untuk menjamin adanya fleksibilitas dalam rangka pengembangan organisasi, maka bentuk organisasi harus harus diusahakan sesederhana mungkin. Dalam perkembangannya sampai sekarang ini pada pokoknya ada enam macam bentuk organisasi yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Keempat macam bentuk itu ialah:<sup>19</sup>

#### a) Organisasi Lini

Organisasi Lini adalah bentuk organisasi yang didalamnya terdapat garis wewenang yang berhubungan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Setiap kepala unit mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan kepala-kepala unit satu tingkat di atasnya. Adapun kelebihan dari organisasi lini adalah atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis komando, rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi besar, proses pembuatan keputusan berjalan cepat, dan rasa saling pengetahuan yang tinggi.

---

<sup>18</sup> Muhammad Rifa'i, *Manajemen Organisasi*,.....,h. 63.

<sup>19</sup> Muhammad Rifa'i, *Manajemen Organisasi*,.....,h. 77.

Sedangkan kelemahan dari organisasi lini adalah ada tendensi gaya kepemimpinan otokratis, pengembangan kreatifitas karyawan terhambat, tujuan top manajer sering tidak dapat dibedakan dengan tujuan organisasi, karyawan bergantung pada satu orang dalam organisasi.<sup>20</sup>

#### b) Organisasi Lini dan Staf

Organisasi lini dan staf adalah suatu bentuk organisasi dimana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawahnya serta masing-masing pejabat. Manajer ditempatkan satu atau lebih pejabat staf yang tidak mempunyai wewenang memerintah tetapi sebagai penasihat, misalnya mengenai masalah kearsipan, keuangan personal dan sebagainya.

Adapun kelebihan dari organisasi lini dan staf adalah ada pembagian tugas yang jelas, kerjasama dan koordinasi dapat dilaksanakan dengan jelas, pengembangan bakat segenap anggota organisasi terjamin, dan bentuk organisasi ini fleksibel untuk diterapkan. Sedangkan kelemahan dari organisasi lini dan staf adalah tugas pokok orang-orang sering dinomorduakan, proses pengambilan keputusan berliku-liku dan persaingan tidak sehat antara yang satu dengan pejabat yang lain.<sup>21</sup>

#### c) Organisasi Fungsional

Adalah suatu organisasi dimana wewenang dari pemimpin tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai

---

<sup>20</sup> Muhammad Rifa'i, *Manajemen Organisasi*, .....h. 79.

<sup>21</sup> Muhammad Rifa'i, *Manajemen Organisasi*, .....h. 81.

bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Kelebihan dari organisasi fungsional adalah program terarah jelas dan cepat, anggaran, perosonalia, dan sarana tepat dan sesuai, dan kenaikan pangkat pejabat fungsional cepat. Sedangkan kelemahan dari organisasi fungsional adalah pejabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi, koordinasi sulit dilaksanakan, dan pangkat pejabat fungsional lebih tinggi dibandingkan kepala unit sehingga inspeksi sulit dilaksanakan.<sup>22</sup>

#### d) Organisasi Fungsional dan Garis

Organisasi fungsional dan garis adalah bentuk organisasi dimana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian dibawahnya yang mempunyai keahlian tertentu serta sebagian dilimpahkan kepada kepala pejabat fungsional yang koordinasinya tetap diserahkan kepada kepala bagian. Adapun kelebihan dari organisasi fungsional dan garis adalah solidaritas tinggi, disiplin tinggi, produktivitas tinggi karena spesialisasi dilaksanakan maksimum, pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin atau teknis tidak dikerjakan. Sedangkan kelemahan dari organisasi fungsional dan garis adalah kurang fleksibel dan tour of duty, pejabat fungsional akan mengalami kebingungan karena dikoordinasikan oleh lebih dari satu orang, dan spesialisasi memberikan kejenuhan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Rifa'i, *Manajemen Organisasi*,.....,h. 82.

<sup>23</sup> Muhammad Rifa'i, *Manajemen Organisasi*,.....,h. 84.



## 2. Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruption*” atau “*corruptus*”. Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruption*” berasal dari kata “*corruumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptive/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata “*resuah*” berasal dari Bahasa Arab “*riywah*”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi. *Riywah* (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan.<sup>24</sup>

Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur’aniyah dan Sunnah Nabawiyah yang antara lain mengatakan: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram” (QS Al-Maidah 42). Imam Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan ‘*akkaaluna lissuhti*’ dengan *risywah*. Jadi *risywah* (suap menyuap) identic dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi

---

<sup>24</sup> Yusuf Karniadi, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011), h. 23.

diharamkan mencari suap, menyuap dan menerima suap. Begitu juga mediator antara penyuap dan yang disuap. Hanya saja jumbuh ulama membolehkan penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezhaliman seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa.<sup>25</sup>

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indoensia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran”. Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain disebutkan bahwa korup artinya busuk, suka menerima uang/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut, sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Yusuf Karniadi, *Pendidikan Anti Korupsi*,.....h. 23-24.

<sup>26</sup> Yusuf Karniadi, *Pendidikan Anti Korupsi*,.....h. 24.

## **Penyebab Korupsi**

Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum dan ekonomi, sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi yang mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan faktor organisasi.<sup>27</sup>

### a) Faktor Politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Menurut Susanto korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Sementara menurut De Asis, korupsi politik misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislative ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang.<sup>28</sup>

### b) Faktor Hukum

Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya sustansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang

---

<sup>27</sup> Yusuf Karniadi, *Pendidikan Anti Korupsi*, .....h. 40.

<sup>28</sup> Yusuf Karniadi, *Pendidikan Anti Korupsi*, .....h. 41.

tidak jelas dan tegas sehingga multi tafsir, kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tidak *equivalen* dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat, penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi.<sup>29</sup>

c) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak benar mutlak karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulisyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Menurut pendapat lain menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti menyebabkan merata dan meluasnya korupsi di Indonesia.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Yusuf Karniadi, *Pendidikan Anti Korupsi*,.....h. 41.

<sup>30</sup> Yusuf Karniadi, *Pendidikan Anti Korupsi*,.....h. 43.

#### d) Faktor Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai dan manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.<sup>31</sup>

#### **Bentuk-Bentuk Korupsi**

- a) Penyuapan (*bribery*), mencakup tindakan memberi, dan menerima suap. Model pembayaran seringkali berupa uang atau barang dengan tujuan memperoleh kemudahan, dispensasi, dan memperlancar proses suatu hal yang bersifat menguntungkan bagi dirinya sendirinya.
- b) *Emblezzment*, yakni suatu Tindakan penipuan, dan pencarian sumber daya yang dilakukan pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut dengan bentuk penipuan, atau pencurinya berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.

---

<sup>31</sup> Yusuf Karniadi, *Pendidikan Anti Korupsi*, .....h. 44.

- c) *Farud*, yakni tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*), misalnya proses memanipulasi atau mendistorsi informasi, dan fakta dengan tujuan meraih keuntungan tertentu. Pelaku yang melakukan tindakan manipulatif ini adalah mereka yang biasanya memiliki posisi superior, dan menduduki jabatan strategis, misalnya agensi pemerintah yang bekerjasama dengan pihak-pihak swasta membangun jaringan perdagangan ilegal.
- d) *Extortion*, adalah Tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, misalnya uang proteksi atau uang keamanan. Tindakan ini sering kali dilakukan mafia-mafia lokal, dan regional.
- e) *Favouritism*, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Tujuan memperkaya diri ini misalnya dilakukan dengan cara mendistribusikan sumber daya yang dibuat sebias mungkin agar individu yang bersangkutan dapat membuat klaim kepemilikan atau sumber data tersebut. Pihak-pihak yang terkait antara lain, keluarga klan, suku, maupun agama tertentu.
- f) *Nepotism*, jenis ini merupakan bentuk spesifik dari *Favouritism*. Salah satu contoh dari tindakan ini ialah pejabat-pejabat publik yang berusaha mengamankan kekuasaan dan

posisi politiknya dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam posisi kunci dalam lembaga politik atau lembaga ekonomi.<sup>32</sup>

### **Bahaya Korupsi**

#### a) Bahaya Korupsi terhadap Masyarakat dan Individu

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*. Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain.

Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat. Chandra Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berfikir tentang dirinya sendiri semata-mata.

---

<sup>32</sup> Mohamad Mufi, "Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Islam" (Skripsi Sarjana UIN "Sunan Kalijaga", Yogyakarta 2007), h. 35.

Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan public untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.

b) Bahaya Korupsi terhadap Generasi Muda

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.

c) Bahaya Korupsi terhadap Politik

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak *legitimate* di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu, *money politics* dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan



menggunakan kekerasan atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.

Disamping itu keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia.

d) Bahaya Korupsi terhadap Ekonomi Bangsa

Korupsi merusak perkembangan suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek), nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.

Penelitian empirik oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena investor akan berfikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi (seperti untuk penyuapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu).

e) Bahaya Korupsi Bagi Birokrasi

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan mendapatkan layanan yang baik karena menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.<sup>33</sup>

### 3. Pendidikan Anti Korupsi

Anti korupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi. Anti korupsi merupakan sikap yang dapat mencegah (upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindak korupsi) dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi.

Pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah atau madrasah dan pendidikan informal di masyarakat. Pendidikan anti korupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai anti korupsi saja, akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai,

---

<sup>33</sup> Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15. No. 3. (2018), h.250-262

penghayatan nilai dan pengalaman nilai anti korupsi menjadi kebiasaan sehari-hari.<sup>34</sup>

### **Tujuan Pendidikan Anti korupsi**

Tujuan yang dicapai melalui pendidikan antikorupsi adalah sebagai berikut :<sup>35</sup> *Pertama*, untuk menanamkan semangat antikorupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat antikorupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, pekerjaan membangun bangsa yang terseok-seok karena adanya korupsi di masa depan tidak akan terjadi lagi. Jika korupsi sudah diminimalisasi, setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal. *Kedua*, menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, melainkan tanggung lembaga pendidikan dan semua komponen anak bangsa.

### **Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi**

Nilai-nilai anti korupsi menurut Agus Wibowo kemudian dikenal dengan istilah sembilan nilai antikorupsi sebagai berikut: 1) Kejujuran, 2) Kemandirian, 3) Kedisiplinan, 4) Tanggung jawab, 5) Kerja keras, 6) Sederhana, 7) Keberanian, 8) Keadilan, dan 9) Kepedulian. Berikut nilai-nilai antikorupsi yang menjadi prinsip-prinsip dalam mencegah tindak korupsi.

---

<sup>34</sup> Muhammad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h..178.

<sup>35</sup> Muhammad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h.180.

### 1) Kejujuran

Agus Wibowo berpendapat kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Nilai kejujuran di dalam dunia akademik dapat diwujudkan dengan tidak mencontek, tidak melakukan plagialisme, dan tidak memalsukan absen serta nilai. Plagialisme merupakan tindakan yang tidak jujur atau penipuan.

### 2) Kepedulian

Sikap kepedulian menurut Agus Wibowo merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya Heni Purwulan menyatakan bahwa kepedulian merupakan sebuah sikap keterhubungan dengan manusia pada umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota komunitas manusia. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa, kepedulian dapat diartikan sebagai sikap kepekaan terhadap sesama, lingkungan dan negara.

### 3) Kemandirian

Kemandirian merupakan sikap penting yang harus dimiliki seseorang supaya tidak selalu bergantung dengan orang lain. Hal ini dipertegas oleh pendapat Agus Wibowo bahwa kemandirian merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan

tugas. Kemudian Ika Ratna & Rita memberikan pendapat bahwa kemandirian dapat diartikan sebagai kemandirian untuk dengan sendirinya memiliki keinginan belajar, tanpa adanya pelaksanaan dari pihak luar dilaksanakan dengan inisiatif dirinya.

#### 4) Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan pertuaran. Manfaat hidup disiplin adalah dapat mencapai tujuan hidup dengan tepat dan efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya memberikan kepercayaan terhadap diri kita.

#### 5) Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan ciri manusia yang beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### 6) Kerja Keras

Kerja keras merupakan suatu upaya yang terus dilakukan (tidak pernah menyerah) dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Diperkuat dengan pendapat dari Agus Wibowo kerja keras merupakan

perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

#### 7) Kesederhanaan

Kesederhanaan secara umum dapat dikatakan sebagai kesahajaan dalam bersikap, bertindak, serta berbicara. Kesederhanaan merupakan penempatan segala sesuatu pada tempat dan ukurannya secara tidak berlebihan. Agus Wibowo berpendapat bahwa kesederhanaan merupakan sikap bersahaja, sikap dan perilaku tidak berlebihan, tidak banyak seluk beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati.

#### 8) Keberanian

Keberanian merupakan sikap hati yang mantap dan rasa percaya diri yang benar dalam menghadapi kesulitan. Keberanian dapat dikatakan sebagai suatu sifat mempertahankan dan memperjuangkan apa yang dianggap benar dengan menghadapi segala bentuk bahaya, kesulitan, kesakitan dan lain-lain dengan penuh tanggung jawab. Nilai keberanian jika dikembangkan dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi akan menumbuhkan sikap berani melawan korupsi serta berani untuk tidak berbuat korupsi.

#### 9) Keadilan

Keadilan merupakan sikap yang menempatkan segala sesuatu pada ukurannya dengan tidak membedakan serta tidak merugikan orang lain. Menurut Agus Wibowo keadilan merupakan sikap yang menunjukkan tindakan sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak/pilih kasih, berpihak/berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral objektif dan proposional.<sup>36</sup>

### **4. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.<sup>37</sup>

Pemberdayaan sangat berkaitan dengan struktur yang timpang. Dalam struktur yang timpang, ada sebagian pihak yang memiliki kesempatan, kekuatan, dan kemauan untuk memenuhi

---

<sup>36</sup> Mustofa, Akhwani, "Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi di Sekolah Dasar", *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Manusia*, Vol. 4. No. 2. (2019), h. 44-46.

<sup>37</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: KENCANA, 2013), h. 24.

kebutuhannya. Sebagian pihak lain, sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan karena terbatasnya daya. Ketiadaan daya itu sendiri umumnya dikarenakan sistem dan srtuktur yang kurang berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil sebagai implikasinya untuk meningkatkan, akses, kekuatan, dan kemampuan dalam bertindak, dilakukanlah pemberdayaan.<sup>38</sup>

### **Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Mardikanto dan Poerwoko, tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu.

a) Perbaikan pendidikan (*better education*)

Artinya, pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak hanya terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan menyangkut waktu dan tempat, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi seharusnya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perbaikan pendidikan non formal dalam proses pemberdayaan mampu menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar tanpa batas waktu dan umur.

b) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*)

Artinya, Seiring tumbuh dan berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, utamanya aksesibilitas terhadap sumber

---

<sup>38</sup> Tita Ghea Tansia, "Pelayanan Sosial Sekolah Alam Tunas Mulia Dalam Memberdayakan Masyarakat Pemulung di Sumur Batu Bantar Gebang Kota Bekasi" (Skripsi Sarjana UIN Sunan Maulana Hasanuddin, Banten 2019), h. 27-26.



informasi/inovasi, sumber pembiayaan/keuangan, penyedia produk, peralatan dan lembaga pemasaran.

c) Perbaiki tindakan (*better action*)

Artinya, melalui bekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya (SDM (Sumber Daya Manusia) SDA (Sumber Daya Alam) dan sumber daya lainnya/buatan) yang lebih baik, diharapkan akan melahirkan tindakantindakan yang semakin membaik.

d) Perbaiki kelembagaan (*better institution*)

Artinya, dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan masyarakat, terutama pengembangan jejaring kemitraan-usaha, sehingga dapat menciptakan posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat pada masyarakat

e) Perbaiki usaha (*better business*)

Artinya, perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan dapat memperbaiki usaha/bisnis yang dijalankan.

f) Perbaiki pendapatan (*better income*)

Artinya, perbaikan bisnis yang dijalankan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

g) Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Artinya, perbaikan pendapatan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan karena faktor kemiskinan atau terbatasnya pendapatan.

h) Perbaikan kehidupan (*better living*)

Artinya, tingkat pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat, diharapkan dapat memperbaiki situasi kehidupan setiap keluarga serta masyarakat.

i) Perbaikan masyarakat (*better community*)

Artinya, situasi kehidupan yang lebih baik, dan didukung dengan lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang juga lebih baik.<sup>39</sup>

### **Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat**

a) *The Welfare Approach*

*The Welfare Approach* merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu.

b) *The Development Approach*

*The Development Approach* merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dengan memusatkan kegiatannya pada pengembangan proyek pembangunan yang bertujuan untuk

---

<sup>39</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makkasar: De La Macca, 2018), h. 13-14.

meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.

*c) The Empowerment Approach*

*The Empowerment Approach* merupakan pemberdayaan masyarakat dengan melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya.<sup>40</sup>

**Tahapan-Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut teori Isbandi Rukminto tahapan-tahapan dalam memberdayakan masyarakat terbagi menjadi 7 (tujuh) tahapan, yaitu:

a) Tahap Persiapan

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

b) Tahap Pengkajian (*assessment*)

Pada tahap ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

---

<sup>40</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat, .....*, h.120.

c) Tahap Perencanaan Program

Pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d) Tahap Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana,

e) Tahap Pelaksanaan Program

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

f) Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan

sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu yang pendek biasanya membentk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka Panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

#### g) Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.<sup>41</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dan juga dengan menggunakan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.<sup>42</sup>

Penelitian ini akan menggunakan lapangan (*Field Reseach*). Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan metode deskriptif (menggunakan data kualitatif), yang dimaksud

---

<sup>41</sup> Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial*, (Depok : PT Raja Grafindo Indonesia, 2015), h. 206.

<sup>42</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

deskriptif adalah peneliti berusaha menjelaskan mengenai sebuah pendidikan anti korupsi.

## **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Serang, Provinsi Banten. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8 Februari 2021 - 12 April 2021.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data-data dan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian ini, penulis mengadakan komunikasi secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan alat (instrumen) pengumpulan data sebagai berikut:

### **a. Observasi**

Teknik ini dilakukan dengan cara melihat, mengamati dan mencatat proses yang terjadi pada objek penelitian.<sup>43</sup> Dalam hal ini dilakukan pengamatan langsung terhadap komunitas Future Leader For Anti Corruption dalam menjalankan pendidikan antikorupsi di Provinsi Banten.

### **b. Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

---

<sup>43</sup> Siswanto, *Teori Metodologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), h. 65.

keterangan. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung pada responden.<sup>44</sup>

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan metode wawancara semiterstruktur, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, mendengarkan dengan teliti, serta mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Pihak yang diwawancara juga dipintai pendapat serta ide-ide dengan tujuan agar menemukan informasi yang lebih luas dan terbuka. Adapun yang menjadi responden yaitu jajaran pengurus komunitas Future Leader For Anti Corruption (FLAC) Banten.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Pada penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa foto-foto.

## **4. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model Miles and Huberman, yaitu analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Adapun tahapannya sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 83.

#### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan mernagkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya yang kemudian mencarinya.

Penelitian ini membutuhkan data mengenai kondisi sekitarnya, kondisi sosialnya, dan aktivitas setiap harinya. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat lebih mudah menemukan permasalahannya.

#### b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Data yang paling sering digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif adalah data yang berupa teks yang bersifat naratif. Hal ini akan memudahkan untuk dapat dipahami apa yang akan terjadi. Merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan ini masih bersifat sementara, sehingga akan



berubah sewaktu-waktu apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>45</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Data yang didapat dari obyek penelitian selanjutnya akan dideskripsikan dalam bentuk narasi ilmiah. Maka setelah itu akan diketahui kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan penulisan skripsi. Penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang gambaran umum profil organisasi Future Leader For Anti Corruption (FLAC). Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yakni sejarah organisasi FLAC Banten, visi misi serta tujuan dari organisasi FLAC Banten, struktur kepengurusan organisasi FLAC Banten dan program-program kerja dari organisasi FLAC Banten.

---

<sup>45</sup> Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktek Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.....h. 173-174.

BAB III berisi tentang peran organisasi Future Leader For Anti Corruption dalam melaksanakan program pendidikan anti korupsi. Dalam bab ini akan dibahas kasus-kasus korupsi yang ada di Provinsi Banten dan juga pelaksanaan program pendidikan anti korupsi.

BAB IV berisi tentang tahapan-tahapan dalam melaksanakan program pendidikan anti korupsi di Provinsi Banten dan juga faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program pendidikan anti korupsi.

BAB V merupakan penutup yang bersisikan kesimpulan dan saran hasil penulisan yang dilakukan penulis serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan. Kemudian pada bagian akhir penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran.